

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konservatisme adalah prinsip dasar akuntansi yang telah banyak dianut oleh para akuntan sejak abad ke- 15 dan penggunaannya semakin populer dalam tiga dekade terakhir. *FASB Statement of Concept No. 2* mendefinisikan konservatisme sebagai suatu reaksi kehati-hatian (*prudent reaction*) menghadapi ketidakpastian yang akan terjadi. Konservatisme yang diterapkan oleh perusahaan berbeda-beda tergantung ketidakpastian dan resiko yang melekat pada setiap masing-masing unit bisnis perusahaan yang telah diperhitungkan sebelumnya.

Dalam penerapan prinsip konservatisme terdapat pro dan kontra. Pengkritik konservatisme menganggap bahwa prinsip ini dapat mengakibatkan laporan keuangan menjadi bias sehingga laporan keuangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi resiko dari perusahaan. Pendapat ini didukung oleh Monahan (1999) dalam Dwiputranto (2009) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat konservatisme pada suatu laporan, maka nilai buku yang dilaporkan akan semakin bias. IFRS merupakan wujud adanya penolakan dan kritik terhadap prinsip konservatisme akuntansi karena prinsip *fair value* lebih menekankan pada relevansi. Sejak tahun 2010 prinsip konservatisme akuntansi diganti dengan *prudence* / kehati – hatian yang penilaiannya lebih ke arah *current value*. *Prudence* pada dasarnya hampir sama dengan konservatisme akuntansi, hanya saja lebih menekankan pada kehati – hatian dalam pelaksanaan penilai

yang dibutuhkan untuk membuat perkiraan yang sangat diperlukan. Yang dimaksud dengan *prudence* dalam IFRS, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan adalah pendapatan boleh diakui meskipun masih berupa potensi, sepanjang memenuhi ketentuan pengakuan pendapatan dalam IFRS.

Penelitian yang mendukung konservatisme adalah LaFond dan Watts (2006) mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang telah menggunakan prinsip konservatisme dapat mengurangi kemungkinan pihak manager melakukan manipulasi laporan keuangan serta mengurangi *deadweight loss* (biaya agensi) yang timbul sebagai akibat dari asimetri informasi. Oleh sebab itu, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya manipulasi terhadap laporan keuangan adalah dengan penerapan prinsip akuntansi yang konservatif. LaFond dan Watts (2006) dalam penelitian mereka menjelaskan bahwa laporan keuangan yang menerapkan prinsip konservatisme dapat mencegah asimetri informasi dengan cara membatasi pihak manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan.

Salah satu faktor yang sangat menentukan tingkat konservatisme dalam pelaporan keuangan pada suatu perusahaan adalah komitmen dari manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang transparan, akurat dan tidak menyesatkan bagi investornya. Ini merupakan implementasi dari penerapan *good corporate governance*. Implementasi dari *corporate governance* baiknya dilakukan oleh seluruh pihak dalam perusahaan, dengan aktor utamanya adalah manajemen puncak perusahaan yang berwenang untuk menetapkan

kebijakan perusahaan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Salah satu dari kebijakan ini terkait dengan prinsip konservatisme yang digunakan oleh perusahaan dalam melaporkan kondisi keuangannya. Oleh karena itu, karakteristik dari manajemen puncak perusahaan akan mempengaruhi tingkat konservatisme yang akan digunakan dalam menyusun laporan keuangannya.

Manajer sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi dan prospek perusahaan yang lebih baik dibandingkan dengan para *stakeholder*. Para manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada para *stakeholder*. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para *stakeholder* yakin bahwa para manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa para manajer tidak akan mencuri/ menggelapkan atau menginvestasikan kedalam proyek – proyek yang tidak menguntungkan.

Kepemilikan seorang manajer akan menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan. Warfield *et al.*, (1995) menyatakan adanya hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan kandungan informasi dalam laba.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Persentase tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Gideon, 2005). Cornet *et al.*, (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya

terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri.

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan juga diberikan tanggung jawab atas pengawasan terhadap kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini sangat penting mengingat adanya kepentingan dari para manajemen untuk menyampaikan informasi yang kurang transparan yang akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, makas dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan aktivitas perusahaan terhadap dewan komisaris (NCCG, 2001). Selain untuk mensupervisi dan memberikan nasehat kepada dewan direksi sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995, fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan dalam *National Code for Good Corporate Governance 2001* adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai *stakeholder* perusahaan sebaik memonitor efektifitas pelaksanaan *good corporate governance*.

Beasley (1996) menyarankan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dapat meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan dalam pelaporan keuangan yang secara langsung dapat menghindarkan dari asimetri informasi dalam perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Beasley (1996) juga melaporkan bahwa komposisi dewan komisaris lebih penting untuk mengurangi terjadinya

kecurangan pelaporan keuangan. Analisis lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik komisaris yang berasal dari luar perusahaan juga berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecuranga pelaporan keuangan.

Beasley (1996) melaporkan dalam penelitiannya bahwa pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah positif secara signifikan. Untuk itu penelitian ini mendukung bahwa dewan komisaris yang lebih banyak kurang efektif dalam melakukan pengendalian terhadap manajemen.

Ukuran dan komposisi dewan direksi dapat mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas monitoring. Ukuran dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resource dependence* yaitu bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik. S. Beiner *et al.*, (2003) menegaskan bahwa dewan direktur merupakan mekanisme *governance* yang penting, karena dewan direksi dapat memastikan bahwa manajer mengikuti kepentingan para dewan direksi. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan dalam dua hal yaitu untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Keberadaan komite audit sangatlah penting terhadap tata kelola perusahaan. Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan para manajemen perusahaan dalam mengatasi masalah pengendalian. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audt terdiri dari sekurang – kurangnya tiga orang termasuk

ketua komite audit. Utama dan Leonardo (2006) memberikan bukti empiris tentang dampak komposisi komite audit dan kendali dari pengelola perusahaan pada efektivitas komite audit berdasarkan survey atas komite audit perusahaan yang listing di BEJ. Mereka menemukan bukti bahwa komposisi komite audit memiliki dampak positif yang signifikan dalam efektivitas komite audit.

Penelitian ini hendak menunjukkan bukti secara empiris bagaimana pengaruh konservatisme dan *corporate governance* terhadap asimetri informasi. Penelitian ini juga hendak membuktikan mengenai teori – teori yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh sebab itu, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Asimetri Informasi.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap asimetri informasi?
2. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap asimetri informasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisa pengaruh konservatisme akuntansi terhadap asimetri informasi
2. Mengetahui dan menganalisa pengaruh *good corporate governance* terhadap asimetri informasi

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi keuangan mengenai *positif accounting theory*, prinsip akuntansi khususnya konservatisme, asimetri informasi dan *corporate governance theory*. Hasil penelitian ini mungkin juga dapat menjadi acuan penelitian-penelitian sejenis dan penelitian lanjutan.
2. Bagi empiris, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan dalam yang dapat memberikan informasi mengenai tingkat konservatisme dan adanya asimetri informasi di dalam perusahaan dan pengaruh *good corporate governance*.
3. Bagi pembuat standar, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu masukan untuk menilai perlu tidaknya diberikan fleksibilitas dalam kebijakan pengungkapan dalam Pernyataan Akuntansi yang Berlaku Umum (*Generally Accepted Accounting Principles*).